ABSTRAK

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta dan ke sektor publik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Namun di tengah upaya-upaya bersama yang bersifat mulia tersebut, masih ada orang-orang yang tega melakukan upaya-upaya untuk menggembosi penerimaan negara tersebut dengan cara melakukan fraud dan korupsi uang pajak dengan modus faktur pajak fiktif. Dalam perkara-perkara faktur pajak fiktif seringkali ditemukan putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa pidana denda. Namun, tidak seperti putusan tindak pidana korupsi atau tindak pidana narkotika, dimana pidana denda dalam putusan tersebut disertai dengan pidana pengganti berupa pidana penjara atau pidana kurungan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, dalam perkara tindak pidana faktur pajak fiktif tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud". Bahwa putusan hakim tersebut tidak akan menjadi masalah apabila terpidana masih memiliki aset atau harta benda yang bisa dilelang untuk membayar denda, namun akan timbul permasalahan apabila ternyata terpidana sudah tidak memiliki aset atau harta benda untuk dilelang, sehingga Jaksa akan mengalami kesulitan dalam eksekusi putusan hakim tersebut, karena sudah tidak ada aset atau harta benda yang bisa dilelang untuk membayar denda, di sisi lain, Jaksa harus melakukan eksekusi segera setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sebut dengan yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu UU KUP belum menjelaskan dan menegaskan mengenai pengenaan pidana kurungan sebagai pengganti denda dalam perkara perpajakan hingga akhirnya diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2020 yang menjelaskan mengenai tindak pidana perpajakan dapat dikenakan pidana denda, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan kurungan 8 (delapan) bulan dan dikarenakan masih maraknya tindak pidana perpajakan ini maka sebaiknya dalam UU KUP juga dijelaskan mengenai tindak pidana faktur fiktif pajak secara terperinci sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai acuan khusus dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan khususnya faktur pajak fiktif.

Kata Kunci: Penggantian Pidana Denda Dengan Pidana Kurungan, Tindak Pidana Perpajakan, Faktur Pajak Fiktif

ABSTRACT

Tax is the transfer of wealth from the private sector to the public sector which is used to finance general expenditures and which is used as a means of encouraging, inhibiting or preventing to achieve goals that are outside the field of state finance. However, in the midst of these noble joint efforts, there are still people who have the heart to make efforts to deplete state revenues by committing fraud and corruption of tax money with the mode of fictitious tax invoices. In cases of fictitious tax invoices, it is often found that the judge's decision imposes the main punishment in the form of imprisonment and additional punishment in the form of a fine. However, unlike the decision on corruption or narcotics crime, where the fine in the decision is accompanied by a substitute criminal in the form of imprisonment or imprisonment if the defendant is unable to pay the fine, in the case of the fictitious tax invoice crime, the Panel of Judges stated that the convict does not pay the fine at the latest 1 (one) month after the court's decision which has obtained permanent legal force, then the convict's property is confiscated by the Prosecutor and auctioned off to pay the said fine. That the judge's decision will not be a problem if the convict still has assets or property that can be auctioned off to pay the fine, but problems will arise if it turns out that the convict no longer has assets or property to be auctioned off, so that the prosecutor will have difficulty in executing the judge's decision. , because there are no assets or property that can be auctioned off to pay the fine, on the other hand, the Prosecutor must carry out the execution immediately after the court's decision has permanent legal force. This study uses a research method called juridical normative (legal research) using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The conclusion of this study is that the KUP Law has not explained and confirmed the imposition of imprisonment as a substitute for fines in tax cases until the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 10 of 2020 was issued on December 18, 2020 which explains that tax crimes can be subject to fines. If the criminal fine is not paid, it can be replaced with 8 (eight) months imprisonment and due to the prevalence of tax crimes, it is better if the KUP Law also explains the crime of fictitious tax invoices in detail so that it can be used as a special reference in handling tax crime cases, especially fictitious tax invoices.

Keyword: *Replacement of Criminal Fines with Confimenent, Tax Crimes, Fictitious Tax Invoice.*